

**FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI POLITIK¹**
(Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan
Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)

Oleh : Jenli Maarotong²

ABSTRAK

Sebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik, namun pada kenyataannya fungsi partai politik terutama dibidang pendidikan politik dirasa masih sangat lemah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi partai politik PDIP dalam melaksanakan komunikasi politik di Kecamatan Essang Kabupaten Talaud, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan pemilihan informan dalam penelitian ini adalah pengurus partai politik, kader partai, simpatisan, dan masyarakat yang ada di Kecamatan Essang.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kecamatan Essang hanyalah terbatas pada tingkatan internal pengurus partai, sedangkan dengan kader dan simpatisannya terbatas pada saat menjelang kampanye pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislative, sehingga secara umum PDIP Kecamatan Essang belum melaksanakan fungsi komunikasi politik secara maksimal.

Kata Kunci: Fungsi, Partai Politik, Komunikasi Politik.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya kedaulatan tersebut diserahkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Karena itu setiap 5 tahun sekali Indonesia melakukan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga tersebut. Para wakil rakyat berasal dari partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Partai politik dalam pelaksanaannya melakukan fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya adalah komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan penyampaian informasi-informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik sendiri.

Pelaksanaan komunikasi politik dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan *audiens* atau pendengar” (Rush dan Allthof, 1995: 225). Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi politik seringkali mengalami permasalahan. Karena itu sebuah sistem harus berjalan dengan baik dan saling mendukung agar isi pesan tersampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran ini bisa berupa media elektronik maupun cetak. Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan. Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara intern saja tetapi juga ekstern.

Fungsi komunikasi politik sangat menentukan dalam pelaksanaan program partai politik karena dalam melaksanakan program harus adanya kesatuan antara komunikator dan komunikan yang ada di partai politik tersebut. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru” (Budiardjo, 2000: 166).

Partai massa merupakan partai politik dengan tujuan untuk memperoleh anggota dengan sebanyak-banyaknya. Namun partai massa pada dasarnya tidak melihat kualitas yang akan menjadi anggota partai politik. Dari hasil observasi awal ditemukan bahwa kebanyakan anggota dan pengurus partai politik khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kecamatan Essang, sampai di desa, merupakan masyarakat menengah ke bawah dengan lulusan pendidikan rata-rata SLTP bahkan masih banyak yang masih lulusan SD. Hal ini mengakibatkan komunikasi politik sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi karena pola pikir anggota partai politik tersebut masih rendah.

Untuk mengubah kondisi tersebut, PDIP mulai merubah citra dirinya dari yang tadinya partai massa menjadi partai kader. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo, bahwa: “Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memcat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan” (Budiardjo, 2000:166).

Dalam rangka membentuk partai kader tersebut komunikasi politik sangat diperlukan untuk membentuk kader-kader partai yang berkualitas dan tidak terkesan arogan. Untuk mewujudkan komunikasi politik yang baik sesuai dengan yang diharapkan, partai politik perlu melaksanakan komunikasi politik secara tertulis maupun lisan dengan menerbitkan suatu majalah atau reklame. Media ini sangat membantu partai politik dalam menjembatani antara pimpinan dengan anggota. Dalam mediasi ini memuat informasi-informasi yang sedang berkembang di partai politik. Pelaksanaan komunikasi politik sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dari berbagai unsur sering mengalami masalah.

Secara umum perolehan suara partai politik peserta pada pemilu 2009 yang lalu tidak ada satupun partai yang memperoleh suara secara signifikan, begitu pula dengan perolehan suara PDIP di Kecamatan Essang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya janji yang diberikan oleh para Caoln Legislatifnya,

yang tidak dapat ditepati, bahkan setelah Caleg itu sendiri telah terpilih, tidak dapat menepati jajinya, bahkan tak jarang kader PDIP sendiri terkesan meninggalkan konstituennya, sehingga hal ini menyebabkan rasa antipasti dimata para pendukung, yang berimbas kepada partai pengusungnya. Dilain pihak fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak berjalan lagi, sehingga menyebabkan berkurangnya anggota dalam organisasi partai tersebut, adanya ketidak harmonisan terhadap anggota satu sama lain, dapat berakibat konflik, bahkan terpecahnya suatu organisasi itu sendiri

Di Indonesia, partai politik sebagai suprastruktur politik, memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi, karena melalui partai politik fungsi keterwakilan dapat dilaksanakan. Secara umum regulasi tentang pengaturan partai politik, diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pelaksanaan komunikasi politik pengurus kecamatanPDIP Essang, seringkali menemukan masalah yang menghambat proses komunikasi politik itu sendiri, misalnya terjadi miskomunikasi antara Pengurus di tingkatan Pimpinan Kabupaten dan Pimpinan kecamatan secara internal dalam menyampaikan program kerja atau kegiatan sebagai akibat dari tingkat pendidikan pengurus yang masih rendah. Program-Program Partai (PDIP) di tingkat Kabupaten, seringkali tidak tersosialisasi dengan baik sampai dengan tingkat yang paling bawah, yaitu didesa, kasus miskomunikasi ini antara lain terjadi dalam penyampaian program kampanye pada saat menjelang Pemilihan Umum yang seharusnya dilakukan secara tidak arogan, tapi di tingkat Desa sebagai tingkat yang paling bawah dan sebagai pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat justru sering berbuat arogan misalnya saja pelaksanaan kampanye yang mengutamakan kekuatan fisik, akibat hubungan yang kurang baik, yang ditimbulkan dari adanya pertengkaran, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Bahkan mereka sering mengendarai kendaraan dengan kapasitas yang melebihi batas angkutan yang dapat menimbulkan kecelakaan.

Dari 3.542 pemilih tetap yang ada dikecamatan Esaang, sebanyak 2.542 pemilih tingkat pendidikannya adalah SMA, 7 orang berpendidikan Strata Dua (S2), 401 pemilih berpendidikan Strata Satu (S1), 400 pemilih berpendidikan SMP dan 92 pemilih hanyalah lulusan Sekolah Dasar, seperti digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tingkat Pendidikan Pemilih di Kecamatan Essang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	92
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	400
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2.542
4	Strata Satu (S1)	401
5	Strata Dua (S2)	7
6	Strata Tiga (S3)	-

Masalah di atas menurut asumsi penulis memerlukan adanya kesatuan diantara unsur-unsur sistem komunikasi yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai sarana Komunikasi Politik di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut dan melihat pentingnya Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Politik sebagai proses penyampaian informasi bagi terlaksananya program partai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana fungsi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai sarana komunikasi politik di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ada di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam menyampaikan program-program partai yang meliputi penyampaian pesan-pesan politik, arah dan kebijakan partai, dan strategi pemenangan partai.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep partai politik

Pengertian partai politik sangat beranekaragam yang telah dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandang mana para ahli tersebut melihat partai politik. Namun pada intinya semuanya itu mengacu pada arti bahwa partai politik tersebut merupakan organisasi atau tempat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Mirriam Budiardjo (2000:160), bahwa:

“Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka” (Budiardjo, 2000: 160).

Definisi partai politik di atas pengertiannya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh R.H. Soltau dalam Budiardjo (2000:161), yang mengemukakan partai politik adalah sebagai berikut :

“Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” (Budiardjo, 2000: 161).

Partai politik sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan merupakan ciri umum dari tujuan partai politik. Ada beberapa ciri lain seperti yang telah dikemukakan oleh LaPalombara dan Weiner dalam Surbakti (1992:115).

“Kedua ahli tersebut mengemukakan ciri-ciri partai politik sebagai berikut: berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum” (Surbakti, 1992: 115).

Berdasarkan ciri-ciri itu, suatu organisasi politik yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara berkesinambungan, tidak ikut serta dalam pemilihan umum, dan tidak mempunyai wakil di parlemen, tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik. Sebab tanpa memenuhi persyaratan ini, organisasi politik sulit menjalankan fungsi untuk memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkan melalui proses politik.

Konsep komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak di tampung dan di gabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini di namakan “penggabungan kepentingan “(*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini di olah dan di rumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan”(*interest articulation*).

“Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah” (Surbakti, 1992:199).

Pengertian mengenai komunikasi politik di atas tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Budiardjo. Pada intinya kedua pengertian tersebut menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyaluran aspirasi.

“Komunikasi politik ialah proses penyaluran aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang” (Budiardjo, 2000: 163).

Semua kegiatan di atas di lakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukan dalam program partai untuk di perjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

METODE PENELITIAN

Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002: 35).

Metode deskriptif ini ditujukan untuk menganalisa masalah-masalah yang mendeskripsikannya dalam bentuk tuangan tulisan “Metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi, penelitian dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional” (Surakhmad, 1998:139).

Fokus Penelitian

Komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan mempengaruhi perubahan aspek kognitif anggota yang meliputi paham ideologi dan *platform*, yaitu:

1. Penyampaian program-program PDIP, dari tingkat Kabupaten sampai kepada tingkat Desa.

2. Penyampaian pesan-pesan politik kepada kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Arah dan kebijakan partai, serta strategi pemenangan partai.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, studi pustaka, studi lapangan."Observasi dengan partisipasi berarti pengamat ikut menjadi partisipan" (Mulyana, 2001:89). Dengan cara ini peneliti menyatu total dengan keadaan yang sedang dipelajarinya. Observasi partisipasi ini dapat dilakukan melalui hadir dalam rapat-rapat intern. Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan.

Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistemik. Kalau pengamatan dilakukan dengan sambil lalu dan tidak memenuhi prosedur dan aturan yang jelas tidak bisa disebut observasi.

"Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan" (Soehartono, 1998:69).

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus parpol dan masyarakat yang ada di Kecamatan Essang.

"Wawancara tak terstruktur sering disebut wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb) responden yang dihadapi" (Mulyana, 2001:181).

Sedangkan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi tapi juga artikel-artikel di majalah Gema Perjuangan, risalah rapat, notulensi rapat, dan lain-lain.

Studi pustaka, yaitu dengan melakukan kajian terhadap buku, literatur, Peraturan perundang-undangan dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Studi lapangan, yaitu penulis mengadakan penelitian secara langsung dilokasi yang telah ditetapkan yaitu di Kecamatan Essang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi politik partai politik.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, melalui : wawancara, observasi.

"Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder)" (Soehartono, 1998: 67).

Adapun pengertian observasi itu adalah, sebagai berikut :

“Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan” (Soehartono, 1998 : 69).

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang didapat dari : Literatur, dokumen-dokumen, Surat Keputusan, Majalah Gema Perjuangan, Surat Kabar.

Informan

Informan dipilih secara *purposive* yaitu di mana penulis mengambil informan berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang akan dijadikan sebagai anggota informan adalah:

1. Pengurus Partai Politik, masing-masing: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.
2. Masyarakat Kecamatan essang, masing-masing 2 orang mewakili setiap desa.

Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka hal ini disebabkan karena data berupa data kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Dalam menganalisis data yang sudah ada, penulis menggunakan teknik metode kualitatif dengan interpretasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Metode kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, susunan kenyataan dari merekalah yang akan diangkat oleh peneliti; kedua, hasil penelitian bergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara pencari dengan yang dicari; ketiga, konfirmasi proposisi akan menjadi lebih baik verifikasinya apabila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan yang diteliti.

“Interpretatif merupakan pemahaman manusia terhadap makna suatu kata sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dari kata tersebut” (Moleong, 2002: 9).

Interpretasi harus didukung oleh argumentasi yang kuat, yakni dengan menggunakan data dan kategori yang telah dibandingkan dan ditest validitasnya. Interpretasi mencoba memahami data yang diperolehnya melalui observasi dan wawancara dengan mencoba meninjau data itu dari kategori tertentu. Interpretasi mencoba memahami data itu dari segi kategori itu. Bila ternyata ada data yang tidak sesuai dengan kategori itu, interpretasi harus mengubah kategori itu atau mencari kategori lain. Di sini interpretasi menunjukkan kreativitasnya dengan mencoba meninjau data itu dari segi lain.

Jadi data yang telah ada dipahami dan dimengerti maknanya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan data tersebut.

PEMBAHASAN

Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, termasuk didalamnya PDIP Kecamatan Essing, yaitu:

Pertama, berperan sebagai penyalur aneka pendapat dan aspirasi masyarakat yang beragam kemudian mengaturnya sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Proses seperti ini dinamakan *interest aggregation* atau 'penggabungan kepentingan'. Setelah itu pendapat dan aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*) yang akan diajukan sebagai usul dari kebijakan partai politik.

Selanjutnya, partai politik akan memperjuangkan agar pendapat dan aspirasi tersebut dapat dijadikan kebijakan umum (*public policy*) oleh pemerintah. Tuntutan dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Kedua, berfungsi sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan/atau kebijakan pemerintah (sebagai *political socialization*). Arus informasi dan dialog antara masyarakat dan pemerintah berlangsung secara timbal balik.

Ketiga, berfungsi sebagai penghubung sekaligus penerjemah antara pemerintah dan warga masyarakat. Kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dengan menggunakan bahasa teknis, oleh partai politik dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat sehingga komunikasi politik antara pemerintah dan warga masyarakat dapat berlangsung secara efektif.

Partai politik sebagai media untuk komunikasi politik, yang menghubungkan atau mengagregasikan antara pemerintahan dengan masyarakat. Partai adalah corong bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif atas pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Agar terhindar pula dari kesewenang-wenangan pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat pada umumnya karena sangat berkaitan sekali dengan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek dari aturan. Partai akan memediasi masyarakat dengan pemerintah untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan yang lebih baik. Karena seluruh aspirasi masyarakat akan diakomodir oleh partai melalui wakil-wakilnya di parlemen. Fungsi komunikasi politik parpol sangat vital untuk menyampaikan hal-hal yang sangat urgen dari kebijakan pemerintah. misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, aturan-aturan lainnya yang menyangkut hajat masyarakat. Parpol sebagai corong untuk menyampaikan kritikan atas pemerintahan yang menjalankan undang-undang, karena jika masyarakat tidak melakukan otokritik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan maka pemerintah akan sewenang-wenangnya menjalankan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, namun sayangnya ada asas pemanfaatan yang dilakukan oleh oknum partai yang dipercayakan duduk di lembaga pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif.

Selain dari fungsi sebagai media masyarakat untuk menghubungkan dengan pemerintah, maka fungsi komunikasi politik yang lain adalah menyelesaikan masalah (konflik). Akan tetapi jika kita melihat realitas kekinian

partai politik pada dasarnya yang memiliki fungsi-fungsi di atas sangat jauh dari harapan karena sebagian besar terjadinya konflik di Indonesia adalah akibat dari partai politik. pasca pemilihan umum (presiden dan legislatif). Banyak kandidat partai yang merasa kecewa atas hasil penghitungan suara, sehingga menggerakkan (mobilisasi) para kader untuk menyerang kantor KPU, kader partai lain, sekret partai lain bahkan memicu konflik etnis dll artinya parpol sekarang belum melakukan fungsinya secara baik dan maksimal. Karena masih meninggalkan ironi dan anomali sistemik yang di munculkan, adanya konflik SARA yang menyebabkan manusia beragam nyawanya hanya karena kandidat yang kalah mengerahkan massanya untuk menyerang kandidat yang lain karena tidak merasa puas atas hasil pemilihan KPU.

Beberapa implementasi komunikasi politik yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu strategi pemenangan PDIP Essing adalah:

1. Bergerak dan membangun komunikasi politik di Semua level

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa, komunikasi dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan/level, dari individu, kelompok, organisasi hingga komunikasi massa. Strategi komunikasi yang dilakukan di semua level dan lini untuk membangun opini publik sebagai salah satu cara pemenangan PDIP di Kecamatan Essing.

2. Penggunaan Media Massa Modern dan Media Komunikasi Lokal

Dalam pembangunan opini publik, media massa merupakan salah satu media yang sangat strategis. Sedangkan menurut Mcquail media paling baik digunakan secara terencana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkannya dalam program yang berskala besar. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, media massa merupakan media yang dapat menjangkau secara luas ke seluruh pelosok dan penjuru masyarakat tanpa orang atau tokoh harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui media massa pembangunan opini publik dapat dilakukan tanpa harus tokoh politik hadir di masyarakat.

Di samping menggunakan media massa, dapat juga menggunakan media pertemuan langsung dengan masyarakat. Pertemuan langsung ini dapat dikemas dengan bentuk pertemuan lokal, sehingga jenis pertemuannya sangat bervariasi sesuai dengan kondisi lokal dimana pertemuan itu berlangsung. Sejalan dengan pendekatan lokal ini, bahasa komunikasi yang dibangun juga dengan menggunakan term-term low context. Artinya bahasa komunikasi yang digunakan cenderung dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak dengan bahasa tinggi atau yang ilmiah, menggunakan istilah-istilah.

3. Politik Pencitraan

Menurut Schuller inti politik sukses adalah membangun kepercayaan publik. Kandidat perlu dikenal dulu baru mereka percaya. Pencitraan tokoh merupakan pintu bagi masyarakat untuk memilih kandidat di pemilihan lokal. Pencitraan merupakan gambaran yang dimiliki oleh orang banyak tentang diri, pribadi, atau organisasi atau produk. *Political image* yang dapat diusung oleh partai politik adalah membangun image kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut merupakan partai yang sederhana, bersahabat, bersahaja, dan diterima oleh semua kalangan. Pencitraan ini dapat dimunculkan melalui pemasangan baligo, spanduk dan lain sebagainya.

Dua level dalam berkomunikasi yakni penyampaian informasi dan gaya dalam menyampaikan pesan. Komentar yang diberikan baik secara serius maupun

bercanda akan diinterpretasikan penerima menjadi gaya berkomunikasi di pembicara. Gaya pesan ini akan terjadi berulang-ulang. Dari gaya berkomunikasi inilah orang akan menilai bagaimana tipe partai tersebut. Untuk melihat dukungan politik, tidak dapat dilakukan dengan berasumsi. Ini sangat berbahaya dalam pertarungan politik. Kita harus mengetahuinya secara nyata atau riil di masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui dukungan politik di masyarakat adalah dengan melalui *voter intelligence*. Teknologi politik yang sekarang sudah berkembang akan sangat membantu melihat perilaku politik masyarakat secara riil dan ilmiah. Berbagai bentuk kegiatan seperti: pooling, FGD, media analisis, dan penelitian ilmiah merupakan cara yang dapat digunakan untuk melakukan voter intelligence.

Dalam mengadakan komunikasi, maka setiap orang mempunyai strateginya masing-masing, yaitu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apabila strategi menyatakan bahwa dalam proses komunikasi yang dialaminya, ada perimpitan kepentingan, maka barulah ada kemungkinan bahwa komunikasi itu berhasil. Mengingat bahwa proses komunikasi berpangkal pada pikiran dan harapan orang, maka proses komunikasi selalu sukar apalagi untuk mencapai komunikasi komunikasi yang efektif. Apabila komunikasi berjalan dengan harmonis beberapa waktu (artinya ada persamaan dalam tujuan terakhir), maka tercapailah partisipasi. Partai Politik merupakan wadah untuk mencapai tujuan-tujuan, partai politik harus mendefinisikan tujuan-tujuan ini dan alat/cara dengan apa tujuan itu dicapai. Hal tersebut merupakan fungsi dari seorang pemimpin. Fungsi perencanaan meliputi mendefinisikan tujuan partai politik, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan ini, dan mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan. Para pemimpin politik juga bertanggungjawab untuk merancang struktur partai politik. Kita sebut fungsi ini pengorganisasian. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, siapa membawahi siapa, dan dimana keputusan harus diambil.

Komunikasi politik juga dapat diperhitungkan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh partai politik untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Namun jika mengharapkan tujuan yang harus dicapai, maka harus terlebih dahulupemperhitungkan hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan komunikasi politik harus menggunakan SWOT analisis. Diantaranya ada seberapa besar kekuatan yang ada di dalam PDIP, dan kelemahan apa saja yang dimiliki oleh PDIP. Ini dapat dilihat dari internal partai itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah peluang apa saja yang dimiliki oleh PDIP Essing, dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai tersebut. Ini dapat dilihat dari ekstern partai. Dengan menganalisis hal tersebut, maka diharapkan PDIP Essing dapat mengukur seberapa besar potensi yang dimilikinya dalam pencapaian tujuan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Komunikasi politik yang dilaksanakan oleh PDIP tingkat kabupaten sampai dengan ke tingkat kecamatan dan desa belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya informasi mengenai program-program PDIP yang dibuat oleh DPC PDIP Kabupaten Kepulauan Talaud, maupun program-program pemerintah daerah, hal ini disebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki PDIP, dan topografi talaud yang berbentuk kepulauan, yang tidak dapat ditempuh dengan perjalanan darat, serta kurang intensnya pertemuan antar kader dan simpatisan bahkan masyarakat dengan kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif.
2. Peran Media (Pers) dalam memberikan informasi dan program-program partai di kecamatan essing, sampai dengan saat ini berdasarkan hasil penelitian terbukti mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat, kader, dan simpatisan partai, karena biasanya partai politik menggunakan media sebagai sarana informasi, serta penyampaian pesan-pesan partai.
3. Komunikasi politik yang dilakukan perwakilan PDIP yang duduk di legislatif dari kecamatan essing belum efektif, karena adanya keterbatasan yang ditetapkan oleh internal partai, sehingga anggota legislatif tersebut tidak dapat langsung menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut, tetapi harus menunggu petunjuk dan mekanisme yang ditetapkan oleh PDIP.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kepulauan Talaud, harus lebih membangun komunikasi yang lebih efektif lagi, lebih khusus penyampaian program-program DPC PDIP Talaud, agar pengurus PDIP ditingkat kecamatan mengetahui program-program apa saja yang telah dibuat oleh DPC.
2. Mengingat keterbatasan media dalam menyampaikan informasi partai, maka diharapkan DPC PDIP Talaud harus menemukan metode lain untuk membangun komunikasi politik, seperti melakukan rapat/dengar pendapat secara rutin setiap bulan sekali, yang turut dihadiri oleh kader PDIP yang duduk di lembaga legislatif.
3. Diharapkan PDIP dapat merubah/merevisi mekanisme yang ditetapkan, agar legislator PDIP mampu melanjutkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, kader, simpatisan partai, sehingga akan lebih menambah kepercayaan masyarakat kepada PDIP sebagai partai yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhan Dambea. 2010. Komunikasi Politik. Gorontalo: Yayasan Al-Adha dan Yayasan SERAT Manado.
- Budiardjo, Mirriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, Sutoro. 2001. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan*. Riau: Seminar Internasional Ke Dua.

- Kartaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kencana, Inu. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 1989. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 1995. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soehartono, Irawan. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soeratno & Arsyad, Lincoln. 1995. *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Taopan. 1989. *Demokrasi Pancasila: Analisa Konsepsional Aplikatif*. Kupang: Sinar Grafika.
- Uchjana Effendy, Onong. 2002. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- LAINNYA:
- Makalah seminar. 2001. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan*. Riau.
- Majalah Gema Perjuangan. 2004. *Lima Resep Dari Megawati*. Jakarta: Gema Sejati.

Filename: @BCL@28109008
Directory: C:\Windows\system32
Template: C:\Users\Toshiba\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal
.dotm
Title:
Subject:
Author: JAz
Keywords:
Comments:
Creation Date: 5/5/2015 6:03:00 PM
Change Number: 6
Last Saved On: 5/6/2015 9:25:00 PM
Last Saved By: Toshiba
Total Editing Time: 23 Minutes
Last Printed On: 5/6/2015 9:26:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 12
Number of Words: 5,146 (approx.)
Number of Characters: 29,333 (approx.)